Demokrasi Minus Keadaban

PEMILU yang baru usai dua bulan lalu memberikan pelajaran berharga, betapa proses untuk sampai ke tahapan demokrasi yang ideal, yaitu konsolidasi, masih memerlukan ikhtiar dan waktu yang luar biasa panjang. Tahapan yang sedang dilalui bangsa Indonesia saat ini baru transisi demokrasi setelah sebelumnya, dua dekade lalu, berhasil melalui tahapan Krisial yang disebut regime breakdown.

Bukan pekerjaan gampang mengakhiri rezim lama yang memiliki rujukan bagi keutamaan melibatkan dua instrumen kekuasaan, yaitu ideological state apparatus dan repressive state apparatus, kendati pada akhirnya bisa ditumbangkan (regime breakdown) oleh gelombang gerakan masyarakat sipil.


Kenyataannya, momentum transisi setelah terjadinya regime breakdown belum dimanfaatkan secara bijak, terutama oleh kalangan elite, untuk melakukan konsolidasi sehingga bisa terkonsolidasi berbagai kepentingan yang dapat menekan konflik laten menjadi konflik manifes dan mengurangi secara signifikan -jika tidak bisa dihilangkan sama sekali- praktik lancang berupa politik uang yang lagi-lagi melibatkan para elite. Kesadaran memang terjadi, tetapi lebih didorong untuk menciptakan suatu aliansi terbuka sehingga kemudian terbentuk karat.

Beberapa kajian mengungkap, bahwa kartel politik adalah kekuatan keterbatasan sumber keuangan. Karena itu, untuk menutupinya, mereka berburu bukan hanya uang pemerintah yang sudah dialokasikan secara legal kepada partai, tapi juga yang diperoleh melalui perbuatan rente (rent-seeking). Aktivitas tersebut dimungkinkan jika memiliki akses terhadap posisi strategi di pemerintahan dan parlemen.


Karena cenderung pada kepentingan daripada ideologi, tidak sedikit dari kalangan elite, terutama yang ada di partai, pemerintah, dan parlemen, memanfaatkan keadaan untuk melakukan praktik jual beli seperti yang ditulis Jawa Pos dalam rubrik Jati Diri (17/6/2019), yang sebagian kehabisan masuk ke kanong elite, sebagian lain sangat mungkin digunakan untuk kebutuhan operasional partai. Akibatnya, justru demokrasi kita, seperti diingat oleh Romo Syamsul Arifin*)

Konflik yang terjadi setelah Pemilu 2019 mengindikasikan bahwa demokratisasi di Indonesia baru sebatas prosedural, yang tahapan itu pun masih diwarnai sengkarut tata kelola, sementara demokrasi dalam arti substansial masih jauh dari ideal.


Konflik yang terjadi setelah Pemilu 2019 mengindikasikan bahwa demokratisasi di Indonesia baru sebatas prosedural, yang tahapan itu pun masih diwarnai sengkarut tata kelola, sementara demokrasi dalam arti substansial masih jauh dari ideal. Dikatakan mendekati ideal bila praktik demokrasi terbuka, seperti yang disebut Robert W. Hefner dengan democatic civility, yaitu demokrasi yang tegak, antara lain, di atas nilai-nilai toleransi supaya politik elektoral terhindar dari chaos.


*) Guru besar dan wakil rektor I Universitas Muhammadiyah Malang